

PEMBERDAYAAN SDM PEREMPUAN PADA SEKTOR AGRIBISNIS

Fransisca Yaningwati

Dosen Administrasi Bisnis

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Siti Hadidjah

Staf Pemkab Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstract

One of the development goals of government is to eradicate poverty that should be started from the family level. The economic problems faced by the family need an active role of woman that does not depend on husband income. A woman is family potency that has spirit but often weak to they should be empowered. Women empowerment can be done by giving motivation, business adjoin pattern, and skill training so give ability to women for work, business and have income. The motivation to out of poverty need active role and responsibility from all family members. The fact showed that women have significant role to bring her family out of economic difficulty, because beside work at domestic sector (in household), they also demanded to give role in the public sector (out of household) such as agricultural sector.

Keywords: *Development, Poverty, Woman Empowerment*

Pendahuluan

Pembangunan merupakan rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 2005), merupakan suatu *proses*, yang oleh Mikkelsen (2003) dikatakan

sebagai sebuah *proses perubahan*. Perubahan yang dimaksud dalam konsep pembangunan tersebut adalah perubahan ke arah kondisi yang lebih baik (Kartasmita, 1997).

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah salah satu tujuan akhirnya adalah pengentasan kemiskinan. Jumlah penduduk

miskin di Indonesia sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) masih cukup besar. Pada tahun 1990 penduduk miskin di Indonesia berjumlah sekitar 27,2 juta jiwa, tahun 2002 meningkat menjadi sekitar 38,4 juta jiwa. Sementara pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin menurun hingga menjadi sekitar 36,15 juta jiwa, sedangkan Tim Indonesia Bangkit berdasarkan data mentah BPS dan mengolahnya mendapatkan angka kemiskinan untuk Juli 2005 sebesar 18,7% dan angka estimasi untuk Maret 2006 sekitar 22,6% (Kompas, 26 Agustus 2006).

Kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga, menuntut peran aktif perempuan untuk tidak tergantung penghasilan suami. Peranan perempuan dalam ikut serta menanggulangi kesulitan ekonomi keluarga tersebut telah diupayakan pula melalui peraturan perundang-undangan yang intinya ingin mengangkat sosok perempuan agar sejajar dengan sosok pria dalam hal-hal tertentu. Salah satu peraturan yang mengatur pemberdayaan perempuan adalah UU No. 25 Tahun 2005 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004 yang mencakup: (1) Program peningkatan kualitas hidup perempuan, (2) Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan perempuan, dan (3) Program peningkatan peran masyarakat dan kemampuan kelembagaan pengarusutamaan gender (Depdagri, 2003).

Perempuan adalah potensi keluarga yang memiliki semangat namun tak berdaya

sehingga perlu diberdayakan. Salah satu penyebab ketidakberdayaan perempuan adalah tingkat pendidikan yang rendah. Data awal yang diperoleh di Kelurahan Puuduria menunjukkan bahwa perempuan dewasa dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD dan hanya tamat SD berjumlah 300 orang dari sejumlah 414 orang, atau sekitar 72,46%. Sehingga, pemberdayaan perempuan antara lain dapat dilakukan dengan memberi motivasi, pola pendampingan usaha, pelatihan ketrampilan, penyuluhan kewirausahaan membekali perempuan agar dapat bekerja, berusaha dan dapat memiliki penghasilan.

Sektor pertanian adalah wahana pemberdayaan perempuan yang tepat. Alasannya, karena Indonesia adalah negara agraris di mana sebagian besar wilayah Indonesia masih memiliki potensi lahan pertanian. Populasi penduduk wanita Indonesia yang cenderung bertambah terus justru dapat dipandang sebagai aset pembangunan serta menjadi modal atau kekuatan pendorong pembangunan nasional. Khusus sektor pertanian menurut Nugroho seperti yang dikutip oleh Nugroho dan Dahuri (2004), proporsi pekerja wanita meningkat sangat signifikan walaupun lebih dengan asumsi bahwa mereka lebih lemah aksesnya terhadap modal, teknologi dan pasar.

Pemberdayaan perempuan dalam sektor pertanian antara lain nampak dalam bentuk kelompok tani. Tidak setiap kumpulan orang adalah kelompok. Sekumpulan

orang disebut kelompok kalau : (1) Saling kenal dan memiliki ikatan bathin satu sama lain, (2) Memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama, (3) Keanggotaannya relatif stabil untuk jangka waktu yang lama, (4) Ada batas jelas yang membedakan anggota dengan bukan anggota, (5) Ada struktur, yaitu pembagian kewenangan, fungsi, peranan dan tugas yang jelas diantara anggotanya, (6) Ada aturan kelompok yang disepakati dan ditaati oleh para anggotanya, dan (7) Ada kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama (Depdagri, 2003). Kelompok perempuan tani antara lain diharapkan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga agar dicapai kehidupan ekonomi, sosial dan budaya keluarga yang lebih baik dan sejahtera. Kelompok ini diharapkan dapat memacu kegiatan ekonomi produktif di lini terkecil yaitu keluarga.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka setidaknya ada beberapa permasalahan yang diidentifikasi berkaitan dengan pemberdayaan perempuan tani, yaitu: (a). Kemiskinan yang dialami oleh keluarga menyebabkan perempuan harus berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja untuk menambah penghasilan keluarga, (b) Salah satu kendala yang dihadapi oleh perempuan adalah kurangnya ketrampilan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, (c) Pertanian adalah salah satu sektor yang menjadi pilihan karena selain Indonesia adalah negara agraris, perempuan dapat diberdayakan dalam sektor pertanian tanpa memperlumahkan tingkat pendidikannya, (d) Pemberdayaan

perempuan dalam sektor pertanian, antara lain dapat melalui keberadaan serta aktivitas kelompok tani, dan (e) Pemberdayaan perempuan tani, tentu saja merupakan salah satu tugas dari pemerintah.

Sektor Agribisnis sebagai Wahana Pemberdayaan Perempuan

Berdasarkan pendapat berbagai ahli, menurut Kurtz seperti yang dikutip oleh Sajogyo dan Martowijoyo (2005) terdapat 4 dimensi pokok yang diacu dalam beragam kombinasi oleh pakar berbeda-beda dalam upaya mendefinisikan arti "*peasant*" yaitu:

1. Definisi petani sebagai "pengolah tanah di pedesaan" (*rural cultivators*). Terbanyak pakar peneliti membatasi diri pada satu dimensi ini, mengabaikan dimensi lain. Mereka berpegang kuat pada teori "pilihan rasional" yang juga berlaku bagi *peasant*, tidak beda dari pelaku ekonomi lain.
2. Kecuali pada dimensi pertama pakar antropolog cenderung juga mengacu pada dimensi "komunitas petani", yang bercirikan perilaku budaya yang jelas, membedakannya dari pola budaya "urban".
3. Pakar pengembang teori "ekonomi moral" masih menambahkan dimensi ketiga yaitu petani yang menghidupi komunitas desa yang ter subordinasi kuat oleh sesuatu kekuasaan luar.
4. Pakar pengikut teori Marx mengacu pada tiga dimensi dalam kombinasi berbeda: yaitu "*rural cultivators*", komunitas ter subordinasi, dan dimensi penguasaan/pemilikan lahan yang diolah petani.

Setiap masyarakat hidup dalam bentuk dan dikuasai oleh lembaga-lembaga tertentu. Lembaga (*institution*) adalah organisasi atau kaidah-kaidah, baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Lembaga-lembaga dalam masyarakat desa ada yang bersifat asli berasal dari adat kebiasaan yang turun temurun tetapi ada pula yang baru diciptakan baik dari dalam maupun dari luar masyarakat desa. Lembaga-lembaga adat yang penting dalam pertanian misalnya pemilikan tanah, jual beli dan sewa menyewa tanah, bagi hasil, gotong royong, koperasi, arisan dan lain-lain. Lembaga-lembaga ini mempunyai peranan tertentu yang diikuti dengan tertib oleh anggota masyarakat desa, dimana setiap penyimpangan akan disoroti dengan tajam oleh masyarakat (Mubyarto, 1995).

Lembaga-lembaga yang ada dalam sektor pertanian sudah mengalami berbagai zaman. Sehingga banyak lembaga yang sudah lenyap tetapi timbul juga lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan iklim pembangunan pertanian dan pedesaan. Suatu lembaga yang hidup sekarang, ada yang merupakan suatu lembaga baru tetapi mungkin juga merupakan lembaga yang sudah mengalami perubahan mengikuti kebutuhan masyarakat. Misalnya sewa menyewa tanah dapat diubah menjadi bagi hasil atau sistem penyakapan, pinjam meminjam uang di bawah tangan dilembagakan dalam bentuk Badan Kredit Desa (BKD), dan organisasi baru dapat dibentuk untuk melancarkan usaha tertentu.

Kelompok tani merupakan salah satu wadah untuk memberdayakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Jamasy (2004) yang mengatakan bahwa media kelompok merupakan satu pola pendekatan pemberdayaan yang belakangan ini mampu mengangkat mereka yang miskin agar menjadi berdaya dan berkembang. Masyarakat diorganisir dalam wadah kelompok, dan kelompok itu dimultifungsikan menjadi media pembelajaran anggota sekaligus proses tukar menukar informasi, pengetahuan dan sikap. Secara perlahan, kekuatan individu akan muncul menjadi kekuatan kelompok dan di situlah berlangsungnya proses penguatan dan pemberdayaan.

Pemberdayaan perempuan tani sehubungan adanya kegiatan kelompok tani dalam peningkatan perekonomian keluarganya.

Pemberdayaan masyarakat, termasuk perempuan tani yang ada di kelurahan Puuduria dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, di mana salah satunya adalah lewat organisasi. Kehadiran wadah ini bisa saja atas prakarsa pemerintah kelurahan, instansi terkait melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) selaku petugas teknis dalam pembinaan dan pengembangan sektor pertanian, maupun atas inisiatif masyarakat sendiri. Terbentuknya kelompok tani yang ada di kelurahan Puuduria, berdasarkan sejarah dan latar belakangnya lebih cenderung karena adanya inisiatif dari pemerintah, berkaitan dengan adanya kunjungan presiden dalam rangka panen raya padi.

1. Pemberdayaan yang terjadi bagi perempuan tani sehubungan keberadaan dan aktivitas kelompok tani

Kelompok tani adalah organisasi yang dihasilkan melalui proses pengorganisasian masyarakat dalam rangka pemberdayaan. Suatu organisasi menurut Keban (2004) dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visinya tercapai. Nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara para *stakeholder* dari organisasi yang bersangkutan.

Berkaitan dengan tulisan ini, hal penting yang ditelaah adalah bagaimana peran perempuan tani yang menjadi anggota kelompok tani di Kelurahan Puuduria yang diberdayakan mulai dari tahap perencanaan program kerja kelompok, pelaksanaan pekerjaan sesuai program kelompok, serta pada tahapan evaluasi kegiatan. Semua ini berhubungan erat dengan penyediaan ruang bagi perempuan tani dalam upaya mereka memperbaiki perekonomian keluarganya.

Tahapan perencanaan adalah proses yang penting, bukan hanya bagi kelompok tani, melainkan juga bagi pemberdayaan masyarakat secara umum. Hal ini sejalan dengan pendapat Cook dan Macaulay (1996) di mana pemberdayaan (*empowerment*) merupakan suatu proses yang memerlukan suatu perencanaan menyeluruh, dengan pemikiran mendalam tentang mekanisme pemantauan dan peningkatan secara terus menerus.

Perencanaan yang matang atas pelaksanaan program, juga dapat membuat kelompok tani mampu melihat segala sesuatu

dengan lebih rasional, dengan memperhatikan kemampuan dan kapasitas yang tersedia. Pertimbangan dana dan waktu yang tersedia harus disesuaikan dengan sumber daya yang ada, sehingga dapat diperoleh hasil maksimal, berupa peningkatan produktivitas pertanian padi sawahnya.

Pemberdayaan perempuan tani di kelurahan Puuduria dalam perencanaan program kerja kelompok sudah nampak, walaupun belum optimal karena masih terbatas pada hal-hal tertentu, misalnya penentuan jenis padi yang akan ditanam. Peserta rapat perencanaan kegiatan umumnya adalah anggota laki-laki saja, sedangkan perempuan tani hanya beberapa orang saja sebagai perwakilan. Peran perempuan dalam perencanaan program kerja kelompok tersebut mungkin terlihat kecil, namun berbicara tentang jenis padi yang akan ditanam, berarti bahwa keterlibatan perempuan tani tersebut sifatnya rutin setiap memulai musim tanam.

Hal positif yang ditemui dalam tahapan perencanaan ini adalah walaupun perempuan tani tidak sepenuhnya dilibatkan, namun adanya kesadaran, rasa kebersamaan dan keadilan yang telah terbina antar sesama anggota kelompok, membuat perencanaan program ini tetap berpihak kepada semua anggota, baik perempuan maupun laki-laki. Program kerja yang mengatur pembagian tugas yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, upah kerja yang sama dan sebagainya, tentu saja telah membuka peluang sebesar-besarnya bagi perempuan tani untuk terlibat dalam aktivitas kelompok. Hal itu juga berarti terdapat